

## KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) DI PEKANBARU DALAM PENGAWASAN OBAT ILEGAL DI APOTEK KOTA PEKAN BARU

Ikhwani Ratna<sup>1\*</sup>, Mutia Fransiska<sup>2</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E-mail: [weni2783@gmail.com](mailto:weni2783@gmail.com)



Received : 13/12/2023  
Revised : 16/01/2024  
Published : 20/01/2024

DOI:  
[doi.org/10.59832/jpmk.v4i1.235](https://doi.org/10.59832/jpmk.v4i1.235)

**Abstrak:** Hasil penelitian ini dapat dipahami, kinerja Balai Besar POM Pekanbaru dalam pengawasan obat ilegal di Apotek Pekanbaru sudah baik, namun belum maksimal dilihat dari indikator yang ada yakni produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, akuntabilitas. Adapun faktor pendukung adalah adanya program-program yang melibatkan kerjasama dengan masyarakat. Kemudian faktor penghambatnya yaitu keterbatasan staf Badan Pengawas Obat dan Makanan baik yang berada di pusat maupun di provinsi, pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilakukan secara berkala dan acak sehingga sering disalahgunakan oleh pengusaha untuk mengambil kesempatan dalam kesempatan untuk memasukkan produk ke Indonesia pada periode saat tidak dilakukan pengawasan, kurang ketatnya sistem pengawasan, kurang dipatuhinya persyaratan- per-syarat peredaran obat, masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau laporan kepada pemerintah ataupun lembaga perlindungan konsumen.

**Kata kunci:** Kinerja, Balai Besar POM, Pengawasan Obat Ilegal

**Abstract:** The results of this study can be understood, the performance of the Pekanbaru POM Center in monitoring illegal drugs in Pekanbaru Pharmacies is good, but not yet maximized seen from the existing indicators, namely productivity, service quality, responsibility, accountability. As for the factors. The supporting factors are programs that involve cooperation with the community. Then the inhibiting factors are the limited staff of the Food and Drug Supervisory Agency both at the center and in the province, the supervision of the Food and Drug Supervisory Agency which is carried out periodically and randomly so that it is often misused by entrepreneurs to take advantage of the opportunity to enter products into Indonesia in periods when no supervision is carried out, lack of strict supervision system, lack of compliance with drug distribution requirements, still low legal awareness of consumers to make complaints or reports to the government or consumer protection agencies.

**Keywords:** Performance, POM Center, Illegal Drug Monitoring

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehat didefinisikan sebagai suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Negara menjamin kesehatan warganya yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan Negara wajib untuk menyediakannya.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BBPOM adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian yang berfungsi dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat-obatan dan makanan di masyarakat. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) merupakan salah satu pelaksana teknis Badan POM yang melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Menurut Perpres No. 80 Tahun 2017, BBPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh kepala BBPOM. dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administrasitif dibina oleh Sekretaris Utama (Erawan, 2018).

Tujuan didirikannya BBPOM di Pekanbaru berdasarkan pasal 3 Peraturan BBPOM Nomor 12 tahun 2018, Unit Pelaksanaan Teknis BBPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memiliki peran yang penting dalam menjamin kesehatan masyarakat maka dalam perjalanannya BBPOM juga harus memperhatikan kinerja dalam pengelolaannya (Cahyaningtyas, 2022).

Laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Menurut data Badan POM kasus peredaran obat ilegal terus meningkat dari tahun 2018 hingga 2021, yang digambarkan dalam tabel diatas. Obat ilegal di Kota Pekanbaru ditahun 2021 semakin meningkat karena pengawasan tidak hanya obat dan permintaan konsumen sesuai dengan kebutuhan saat itu (Sulfiani, 2019).

Tahun 2018-2020 trend pada saat itu adalah ditemukan obat keras daftar obat G disarana tidak berwenang, seperti toko obat. Pada tahun 2021 obat ilegal meningkat karena pada masa itu terjadi pada masa covid 19, diberlakukan distancing dan diberlakukannya lockdown dari Negara tetangga seperti Malaysia (terjadilah kapal-kapal ikan membawa ikan, kelapa atau hasil bumi dari Indonesia dibawa ke Negara tetangga).

Riau adalah wilayah yang berbatasan dengan negara Malaysia. Sebelum terjadi covid 19 banyak yang berobat ke Malaysia, karena tahun 2020-2021 tidak dapat pergi ke negara tersebut maka terjadi pelanggaran adanya pembelian obat ilegal secara sembunyi-sembunyi yang dititipkan ke kapal ikan tersebut.

Masih ditemukannya obat ilegal membuat kita perlu mempertanyakan upaya pengawasan peredaran obat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, tulisan ini tentang pengawasan obat yang berjalan selama ini dan regulasi yang diperlukan

untuk mendukung upaya pengawasan (Masitta, 2014).

Oleh karena itu, tulisan ini tentang pengawasan obat yang berjalan selama ini dan regulasi yang diperlukan untuk mendukung upaya pengawasan. Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengambil judul “ **Kinerja balai besar pengawas obat dan makanan (BBPOM) di pekanbaru dalam pengawasan obat ilegal di apotek kota pekanbaru** ”

## **METODE**

Dalam melaksanakan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini berlokasi di Jl. Diponegoro No. 10, Sumahilang, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menurut (Lexy, 2005) adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena dilapangan dijumpai ada beberapa apotek yang ada dipekanbaru masih menjual obat yang tidak memiliki izin, dan ini sangat membahayakan terhadap kesehatan masyarakat, maka pada hal ini diperlukanya pengawasan dari BBPOM, salah satu pengawasanya yaitu dengan meningkatkan kinerjanya. Masih terdapatnya obat ilegal atau belum mendapatkan izin edar oleh BBPOM yang beredar bebas di di apotek, serta masih terdapatnya obat yang mengandung bahan yang membahayakan kesehatan konsumen. Maka pada hal ini diperlukanya pengawasan dari BBPOM, salah satu pengawasanya yaitu dengan meningkatkan kinerjanya. Peneliti mendeskripsikan bagaimana Kinerja BBPOM dalam Memberikan Pengawasan kepada Apotek Kota Pekanbaru, dengan maksud memahami keadaan yang ada. Data Primer adalah seluruh data yang diperoleh langsung dari informan dalam penelitian ini. Data Sekunder adalah seluruh data yang diperoleh dari laporan ataupun publikasi yang pernah dilakukan oleh berbagai kalangan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Studi Kepustakaan, studi kepustakaan merupakan pengumpulan data atau informasi yang menyangkut masalah yang akan diteliti dengan mempelajari dan menelaah buku, jurnal, karya ilmiah dan bentuk-bentuk tulisan lainnya yang ada relevasinya dengan masalah yang akan diteliti. Studi Lapangan, studi lapangan merupakan pengumpulan data atau informasi lapangan dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data model siklus ini terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Reduksidata, Penyajian data, dan Pengambilan keputusan atau verifikasi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pada Pengawasan Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru**

Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Dalam Pasal 2 Huruf b dan c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi, kimia obat adalah obat yang dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral dan obat syntetis, sedangkan obat asli Indonesia, adalah obat-obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah di Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan dipergunakan dalam pengobatan tradisional. Menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia (Hadi, 2016).

Pengukuran kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pada pengawasan obat ilegal di apotek Kota Pekanbaru berdasarkan empat indikator yaitu indikator produktivitas, Indikator kualitas layanan, indikator responsibilitas, dan indikator akuntabilitas.

Produktivitas Merupakan pengukuran kinerja yang mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan yang dikeluarkan oleh BBPOM dalam pengawasan obat ilegal di Kota Pekanbaru agar tercapai tujuan yang telah di tetapkan. Tujuan tersebut meliputi, Input (sumber daya manusia, sarana dan prasarana), output, efisiensi layanan , efektifitas layanan. Jika produktivitas naik hal ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi (waktu-bahan- tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan dari kemampuan dalam memproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seseorang dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan kinerja sesuai yang telah di tetapkan. Dalam hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pegawai BBPOM Pekanbaru sebagai berikut:

“BBPOM sebagai salah satu jajaran lembaga pemerintah diminta untuk terus meningkatkan produktivitasnya, sebagai contoh ya pas covid-19 diminta dapat menjalankan tatanan kehidupan baru (*new normal*) yang mendukung produktivitas kerja, dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia (Qonaah, 2020). Pas covid kan banyak beredar obat ilegal, masker ilegal, dan lain sebagainya. Terkait hal tersebut, BBPOM di Pekanbaru selalu mengikuti sosialisasi terkait kebijakan penerapan sistem kerja agar berjalan dengan apa yang ingin di capai”. (wawancara dengan M. Rusydi Ridha, bidang penindakan BBPOM Pekanbaru, 15 November 2023).

Terkait produktivitas tersebut peneliti juga melakukan wawancara dengan Apotek Raqila Farma sebagai berikut:

“Kalau di apotek kami selalu ada kunjungan dari BBPOM untuk memeriksa apakah obat yang dijual sudah sesuai standar dan aman untuk masyarakat. Dan kami rasa produktivitas kinerja BBPOM sudah lumayan bagus”. (wawancara dengan pegawai Apotek Raqila Farma, 16 November 2023).

Berdasarkan hal di atas peneliti berpendapat bahwa tingkat produktivitas Balai Besar pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru sudah bagus yaitu dengan melakukan pengecekan rutin ke setiap apotek yang ada di Pekanbaru untuk mengawasi obat ilegal.

Kualitas Layanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru berorientasi pada pelayanan dan pemanfaatan sumber daya organisasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar Obat dan Makanan agar kualitas layanan organisasi dapat tercapai secara maksimal yang meliputi kepuasan masyarakat dan koordinasi antara sesama anggota. Tingkat layanan yang di terapkan Balai Besar POM berhubungan dengan terpenuhinya harapan dan kebutuhan pelanggan atau penggunanya. Artinya pelayanan dikatakan berkualitas apabila suatu organisasi menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan standar yang telah di tetapkan.

Pada umumnya kualitas pelayanan banyak digunakan sebagai dasar bagi produk jasa, karena inti produk yang dipasarkan adalah suatu kinerja yang berkualitas, dan kinerja tersebut yang nantinya akan dibeli oleh pelanggan (Utami, 2022). Oleh karena itu, kualitas kinerja pelayanan merupakan dasar bagi pemasaran jasa. pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima / peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan pelayanan suatu perusahaan. Jika jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka dipersepsikan baik dan memuaskan.

Kualitas layanan juga bisa diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat layanan disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kualitas layanan dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena pelayanan secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki kualitas layanan rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. Dalam hal ini terkait dengan kualitas pelayanan peneliti melakukan wawancara kepada pegawai BBPOM sebagai berikut:

“Untuk kualitas layanan kami selalu memprioritaskan nomor satu, seperti pengaduan 24 jam untuk masyarakat, menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat, dan lain sebagainya”. (wawancara dengan M. Rusydi Ridha, bidang penindakan BBPOM Pekanbaru, 15 November 2023

Kualitas Layanan Balai Besar POM Pekanbaru berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kualitas Layanan Balai Besar POM Pekanbaru sudah cukup baik dalam rangka menampung, merespon, dan menindaklanjuti berbagai pertanyaan dan pengaduan dari masyarakat terkait dengan masalah obat ilegal, produk kosmetik ilegal, dan lain sebagainya yang tersebar luas di Pekanbaru. Akan tetapi, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru harus senantiasa bersifat aktif dalam melakukan pengawasan terhadap obat ilegal yang ada di Kota Pekanbaru, jangan hanya menunggu pengaduan dari masyarakat.

Suatu paparan yang digunakan untuk pemberian makna adanya kewajiban moral dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada sekelompok atau seseorang (Harahap, 2015). Hal ini memberikan konotasi adanya internalisasi dari suatu kewajiban atau rasa kepemilikan pribadi dari suatu penugasan. Gagal menyelesaikan penugasan dari kewajiban tersebut menjadi dasar dari adanya rasa malu dan bersalah apa bila suatu tugas tersebut tidak selesai dan tidak tepat sasaran, dan responsibilitas juga menjelaskan dan mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi. Berdasarkan hal di atas peneliti berpendapat bahwa responsibilitas Balai Besar POM Pekanbaru sudah cukup baik dalam rangka

pelaksanaan kegiatan/program terkait pengawasan produk obat ilegal.

Akuntabilitas merupakan konsep etika atau pertanggungjawaban dari pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi yang berkaitan dengan pengawasan obat ilegal oleh BPOM di kota pekanbaru.

Akuntabilitas merupakan konsep etika yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengerjakan tatanan administrasi yang telah disepakati bersama baik itu di dalam organisasi atau instansi. Adapun kewajibannya harus melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Mengenai hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pegawai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru sebagai berikut:

Berdasarkan hal di atas peneliti berpendapat bahwa kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru sudah baik. Akan tetapi, untuk menindak oknum apotek yang menjual obat ilegal tidak bisa hanya melakukan pengawasan semata, harus dibarengi dengan sanksi yang tegas untuk membuat efek jera bagi oknum tersebut. Karena beberapa tahun belakangan ini masih saja ditemukan oknum apotek yang masih menjual obat ilegal, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Mengawasi Obat Ilegal di Apotek Kota Pekanbaru**

Membuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Risiko Untuk Melindungi Masyarakat

Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin.

Peningkatan Pembinaan dan Bimbingan Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Pelaku Usaha Dalam Memberikan Jaminan Keamanan dan Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan BPOM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan. Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut agar para produsen obat dan makanan selalu konsisten dalam melakukan produksi obat dan makanan yang sesuai standar BPOM.

Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Publik Melalui Kemitraan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Strategi BPOM mencakup eksternal dan internal, menyadari keterbatasan BPOM baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut (Launde, 2020). Dalam hal ini BPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi.

**Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Penataan Struktur Yang Kaya Dengan Fungsi, Proses Bisnis Yang Tertata dan Efektif, Budaya Kerja Yang Sesuai Dengan Nilai Organisasi Serta Pengelolaan Sumber Daya Yang Efektif dan Efisien**

Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung *risk based control*, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Besar POM Pekanbaru dalam pengawasan terhadap peredaran obat ilegal ada 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Adapun Hambatan Internal meliputi:

1. Keterbatasan staf Badan Pengawas Obat dan Makanan baik yang berada di pusat maupun di provinsi sehingga menjadikan kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak maksimal. Jumlah staf yang terbatas ini tentu mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, apalagi ditambah dengan wilayah kerja yang sangat luas, sehingga akan berpengaruh pada intensitas pengawasan yang rendah ataupun lingkup pengawasan produk yang lebih sempit.
2. Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilakukan secara berkala dan acak, sehingga sering disalahgunakan oleh pengusaha untuk mengambil kesempatan dalam kesempatan untuk memasukkan produk ke Indonesia pada periode saat tidak dilakukan pengawasan.

Sedangkan Hambatan Eksternal meliputi:

1. Kurang ketatnya sistem pengawasan.
2. Kurang dipatuhinya persyaratan-per-syaratannya peredaran obat.
3. Masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau laporan kepada pemerintah ataupun lembaga perlindungan konsumen.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru dalam melakukan pengawasan obat ilegal di Apotek Pekanbaru dilakukan dengan cara evaluasi terhadap setiap apotek di Pekanbaru, apakah obat yang dijual sudah layak edar dan dapat diberikan izin pengedarannya. Berdasarkan indikator yang ada, kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru dalam melakukan pengawasan obat ilegal di Apotek Pekanbaru sudah cukup baik, akan tetapi sanksi yang diberikan masih lemah sehingga oknum apotek yang menjual obat ilegal masih saja terus ada.
2. Adapun faktor pendukung Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan pekanbaru dalam melakukan pengawasan obat ilegal di Apotek Pekanbaru dengan melakukan program-program seperti membuat sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat, peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk obat dan makanan, peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan staf Badan Pengawas Obat dan Makanan baik yang berada di pusat maupun di provinsi, pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang dilakukan secara berkala dan acak sehingga sering disalahgunakan oleh pengusaha untuk mengambil kesempatan dalam kesempatan untuk memasukkan produk ke Indonesia pada periode saat tidak dilakukan pengawasan, kurang ketatnya sistem pengawasan, kurang dipatuhinya persyaratan-persyaratan peredaran obat, masih rendahnya kesadaran hukum konsumen untuk melakukan pengaduan atau laporan kepada pemerintah ataupun lembaga perlindungan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningtiyas, N. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Pengawasan Sediaan Obat yang tidak Memiliki Izin Edar pada Saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(8).
- Erawan, P. A. (2018). Peranan Value For Money untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(3).
- Harahap, S. S. (2015). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Edisi 1-10*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Launde, A. P. (2020). Tugas dan Fungsi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Melindungi Kesehatan Masyarakat di Kota Manado (Studi Kasus Tentang Penggunaan Bahan Makanan Berbahaya di Kota Manado). *Eksekutif*, 4(4).
- Lexy, M. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Masitta, R. (2014). Peranan Penyidik Pegawai Negeri sipil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional Ilegal Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa*, 1(1).
- Qonaah, siti qonaah. (2020). Strategi BPOM dalam upaya mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan obat Ilegal melalui Gerakan “Waspada Obat Ilegal.” *Jurnal Komunikasi*, 11(1).
- Sulfiani, A. N. (2019). Efektifitas Pengawas Dinas Kesehatan Dalam Peredaran Obat dan Makanan Di Kabupaten Bone. *Jurnal I La Galigo, Publik Administration Journal*, 2(2).

Utami, A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Obat-Obatan Ilegal Secara Online. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2).